

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang masih berhadapan dengan persoalan struktural, salah satunya adalah ketimpangan. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat, tetapi juga dalam ketidakseimbangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas publik lainnya. Kondisi ini terjadi karena variasi faktor produksi, ketersediaan sumber daya, dan tingkat pembangunan antarwilayah yang berbeda-beda (Kuncoro, 2006).

Ketimpangan pendapatan adalah ketidakseimbangan dalam pembagian pendapatan di masyarakat. Semakin tinggi ketimpangan, semakin besar perbedaan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika terus dibiarkan, ketimpangan ini akan semakin mempersempit ruang bagi kelompok rentan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mengakses mobilitas sosial. Selain itu, apabila kondisi ini dibiarkan tanpa adanya intervensi kebijakan yang memadai, maka akan berimplikasi negatif terhadap berbagai aspek, seperti melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Gini Ratio Indonesia pada 2013 yaitu 0,409 Lalu pada tahun 2017 sebesar 0,392 dan pada tahun 2024 mejadi 0,38, yang menunjukkan masih lebarnya jurang distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat.

Tabel 1.1 Gini Ratio Indonesia

Gini Ratio Indonesia	
Tahun	Tahunan
2005	0,355
2006	0,357
2007	0,376
2008	0,368
2009	0,357
2010	0,379
2011	0,399
2012	0,411
2013	0,409
2014	0,41
2015	0,405
2016	0,395
2017	0,392
2018	0,386
2019	0,381
2020	0,383
2021	0,382
2022	0,382
2023	0,387
2024	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Nilai koefisien Gini yang terdapat pada Tabel 1.1 memperlihatkan dinamika ketimpangan pendapatan di Indonesia sepanjang periode 2005-2024. Terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan nasional mengalami fluktuasi, menandakan bahwa pemerataan distribusi pendapatan belum sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2005, Gini Ratio Indonesia tercatat sebesar 0,355, lalu mengalami peningkatan hingga 0,376 pada 2007 dan mencapai titik tertinggi 0,411 pada 2012, yang menunjukkan pergeseran dari kategori ketimpangan rendah menuju ketimpangan sedang (0,35–0,50). Peningkatan tersebut tidak lepas dari

tekanan ekonomi yang terjadi, seperti terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja maupun pendidikan.

Setelah tahun 2015, Gini rasio cenderung menurun hingga mencapai 0,38 pada 2024, namun masih berada dalam kisaran yang menunjukkan ketimpangan cukup tinggi. Ini menggambarkan bahwa pendapatan nasional masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, sementara kelompok bawah belum menikmati hasil pertumbuhan ekonomi secara proporsional. Hal ini sejalan dengan temuan *World Inequality Database* (Chancel et al., 2023) yang menyebutkan bahwa kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia masih meningkat, di mana sekitar 10% penduduk terkaya menguasai hampir separuh total pendapatan nasional.

Teori Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung semakin timpang, dan baru akan menurun seiring dengan semakin matangnya proses pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya kebijakan yang tepat, ketimpangan bisa menjadi konsekuensi alami dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang berdampak pada proses peningkatan kesejahteraan nasional menjadi terhambat. Pada kerangka ini, pertumbuhan ekonomi jangka panjang seharusnya membawa perbaikan dalam distribusi pendapatan. Namun kenyataannya, pola tersebut belum sepenuhnya tercermin di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional relatif stabil, dengan rata-rata PDB di atas 5% dalam beberapa tahun terakhir, tingkat ketimpangan masih tinggi dan tidak menunjukkan penurunan yang berarti.

Ketimpangan pendapatan, dapat menurunkan minat investasi dan inovasi, serta memperburuk kondisi sosial melalui berkurangnya mobilitas kesehatan maupun sosial. Bahkan, ketimpangan yang berlarut-larut berpotensi memicu peningkatan angka kejahatan dengan kekerasan (Polacko et al. 2021). Salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan adalah melalui pembangunan sumber daya manusia yang dapat difasilitasi melalui alokasi belanja pemerintah.

Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), pengeluaran negara berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki distribusi pendapatan melalui penyaluran dana kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dengan kata lain, belanja pemerintah memiliki potensi besar untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan apabila diarahkan secara tepat. Belanja pemerintah merupakan bentuk intervensi melalui alokasi anggaran yang ditujukan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, hingga Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat keadilan distribusi kesejahteraan.

Namun dalam implementasinya, meskipun anggaran belanja negara mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya, dampaknya terhadap penurunan ketimpangan pendapatan belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, realisasi belanja pegawai mencapai sekitar Rp412,71 triliun, belanja barang/jasa sekitar Rp432,71 triliun, dan belanja modal sekitar Rp303,04 triliun dari total belanja pemerintah pusat Rp2.239,79 triliun. Ini menunjukkan bahwa meskipun belanja modal meningkat secara nominal, porsi belanja rutin (pegawai dan barang) tetap lebih tinggi sehingga potensi redistributif dari belanja modal relatif tidak dominan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja negara belum efektif dalam mengurangi ketimpangan, yang kemungkinan disebabkan oleh kurangnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran, keterlambatan realisasi, serta ketidaktepatan sasaran dari sejumlah program sosial pemerintah.

Dartanto dan Putra (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan pendapatan atau pengeluaran adalah adanya ketimpangan dalam akses kesempatan, dimana pendidikan menjadi salah satu aspek yang memengaruhi ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang. Pendidikan yang berkualitas dan merata diyakini mampu meningkatkan produktivitas individu dan memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Becker (1993) dalam teori modal manusia menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi paling krusial dalam meningkatkan produktivitas individu, yang secara langsung berkaitan dengan peluang pendapatan dan akses terhadap pekerjaan layak.

Upaya pemerintah meluncurkan berbagai program, termasuk wajib belajar 12 tahun, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pengembangan pendidikan vokasional. Selain itu, reformasi kurikulum melalui kebijakan Merdeka Belajar dan revitalisasi SMK bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar lebih siap dan fleksibel menghadapi tuntutan dunia kerja. Meskipun demikian, ketimpangan dalam hal akses dan kualitas pendidikan masih terlihat, terutama antarprovinsi, sehingga menimbulkan perbedaan kemampuan dan kesempatan kerja yang signifikan.

Namun realitasnya, ketimpangan akses dan mutu pendidikan di Indonesia masih terjadi. Menurut BPS, rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia meningkat

dari 7,3 tahun pada 2005, lalu 8,69 tahun pada 2022 menjadi 8,85 tahun pada 2024, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2019-2024. Meski demikian, capaian ini masih setara dengan tingkat pendidikan SMP, sehingga menunjukkan perlunya pemerataan akses pendidikan yang lebih merata, terutama mengingat adanya perbedaan yang signifikan antarprovinsi. Perbedaan ini turut menciptakan ketimpangan dalam hal keterampilan dan akses terhadap pekerjaan berkualitas, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan pendapatan.

Ketidakseimbangan ini menyebabkan perbedaan kompetensi dan peluang kerja antar wilayah, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan pendapatan. Di sisi lain, tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan lulusan pendidikan tinggi, menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Menurut Mankiw (2018), pengangguran kerap kali muncul akibat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan pasar (job mismatch). Data Bappenas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dalam satu dekade terakhir masih berada antara 5% hingga 7%. Bahkan sekitar 30% lulusan perguruan tinggi bekerja di sektor informal atau pada bidang pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia sempat berada di sekitar 6 persen pada tahun 2015, kemudian menurun secara bertahap menjadi sekitar 5,39 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, angka ini merosot lebih jauh menjadi 4,87 persen, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun demikian, penurunan angka pengangguran tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan distribusi pendapatan.

Pemerintah telah berupaya menjembatani hal ini melalui program seperti Kartu Prakerja, revitalisasi pendidikan vokasi, dan penguatan balai latihan kerja. Namun, akses terhadap program-program tersebut masih belum merata di seluruh wilayah, khususnya di daerah tertinggal. Oleh karena itu, pengangguran dapat dilihat sebagai jalur perantara yang menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah, pendidikan, dan ketimpangan pendapatan.

Penelitian oleh Dai et al. (2023) menemukan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah Indonesia bagian barat dan timur, yang berarti peningkatan lama sekolah cenderung menaikkan ketimpangan pendapatan secara tidak signifikan. Sebaliknya, pengeluaran per kapita menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, yang mengindikasikan bahwa bertambahnya pengeluaran per kapita dapat menurunkan ketimpangan pendapatan secara nyata di wilayah tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan analisis yang komprehensif untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi ketimpangan, bukan hanya aspek pendidikan tetapi juga faktor ekonomi lainnya. Penelitian

Hindun et al. (2019) menyimpulkan bahwa secara parsial, pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sementara pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ketika diuji secara simultan, variabel tersebut pendidikan, pengangguran, dan kemiskina ternyata berpengaruh bersama-sama secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun demikian, belum banyak penelitian yang menguji pengaruh pengeluaran pemerintah dan pendidikan secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan dengan memasukkan pengangguran sebagai variabel mediasi.

Penelitian ini mengkaji pengaruh langsung maupun tidak langsung karena hubungan antara pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, dan ketimpangan pendapatan memiliki keterkaitan yang kompleks. Tingkat pengangguran berfungsi sebagai variabel mediasi yang dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh kedua variabel tersebut terhadap ketimpangan pendapatan. Melalui analisis jalur, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai mekanisme hubungan antarvariabel dalam konteks perekonomian Indonesia. Pendekatan ini juga diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal dan peningkatan kualitas pendidikan dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan melalui penurunan tingkat pengangguran.

Oleh karena itu, topik ini diangkat dalam penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2005–2024”, guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap faktor-faktor struktural yang memengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2005 sampai 2024?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2005 sampai 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pengangguran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pengangguran.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya literatur dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah, pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengeluaran dan peningkatan kualitas pendidikan yang efektif untuk menekan pengangguran dan mengurangi ketimpangan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang ingin menganalisis faktor-faktor ketimpangan melalui pendekatan kuantitatif dengan variabel mediasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Structural Inequality Theory

Ketimpangan sosial dan ekonomi tidak semata-mata muncul akibat perbedaan kapasitas individu, melainkan merupakan hasil dari sistem sosial yang terbangun dan berlangsung secara turun-temurun. Struktur sosial ini mencakup institusi pendidikan, pasar tenaga kerja, dan distribusi infrastruktur yang secara historis lebih menguntungkan kelompok tertentu. Dalam masyarakat yang akses terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan formal, dan layanan publik tidak merata, kesenjangan pendapatan cenderung bertahan bahkan ketika berbagai indikator pembangunan mengalami peningkatan. Pemikiran ini berkembang dari teori konflik dan keadilan distributif, seperti yang diangkat oleh Iris Marion Young (1990), yang menekankan bahwa ketidakadilan tidak hanya bersumber dari kebijakan eksplisit, tetapi juga dari norma dan sistem sosial yang menciptakan hambatan bagi kelompok tertentu untuk berkembang secara adil.

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi, Thomas Piketty (2013) melalui karyanya *Capital in the Twenty-First Century* juga menunjukkan bahwa kesenjangan bukan sekadar akibat dari upaya atau produktivitas, tetapi berkaitan erat dengan sistem pewarisan kekayaan dan akses ekonomi yang tidak setara. Ketika distribusi peluang dan sumber daya sejak awal tidak merata, maka hasil dari proses pembangunan juga cenderung berpihak pada kelompok yang telah lebih dulu unggul. Teori ketimpangan struktural menjelaskan bahwa ketimpangan tidak bersifat temporer atau alami, melainkan tertanam dalam cara sistem sosial

dijalankan dan dalam siapa yang memiliki kontrol terhadap akses terhadap sumber daya tersebut.

Dalam konteks pendidikan, struktur sosial yang timpang menciptakan perbedaan kualitas dan akses yang sangat lebar antara kelompok atau wilayah. Sekolah dengan fasilitas, tenaga pengajar, dan dukungan ekonomi yang baik hanya tersedia bagi sebagian masyarakat, sementara kelompok lainnya menghadapi berbagai keterbatasan. Ketika pendidikan tidak merata, maka hasil dari proses pendidikan juga tidak akan seragam, yang menyebabkan ketimpangan dalam kesiapan masuk pasar kerja dan akses terhadap pekerjaan yang lebih layak. Dalam jangka panjang, kelompok yang tidak memperoleh akses tersebut cenderung tertinggal secara ekonomi, dan hal ini memperkuat kesenjangan yang ada.

Penelitian Elga Andina (2025) menekankan bahwa peningkatan tingkat partisipasi dalam pendidikan tinggi tidak serta merta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan karena keuntungan dari pendidikan sering kali lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sudah memiliki posisi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, tanpa adanya pemerataan akses dan distribusi pendidikan, pendidikan tinggi justru dapat memperdalam kesenjangan yang ada. Hal serupa juga ditegaskan oleh Putri (2025) distribusi sumber daya pendidikan, infrastruktur, dan akses ekonomi yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial dan pendapatan antar kelompok masyarakat. Penulis menegaskan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang fokus pada pemerataan dan redistribusi sumber daya, ketimpangan tersebut akan tetap ada dan memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi.

Kondisi seperti ini juga berdampak pada tingkat pengangguran. Ketika sistem pendidikan tidak diikuti dengan akses yang merata ke pasar kerja formal, maka lulusan dari kelompok marjinal lebih rentan tidak terserap dalam sektor produktif. Akibatnya, pengangguran cenderung tinggi pada kelompok tertentu, meskipun tingkat pendidikan nasional meningkat. Pengangguran yang tinggi kemudian berkontribusi pada ketimpangan pendapatan, karena kelompok yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang berada dalam sektor formal yang stabil. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pendidikan dan ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh kondisi struktural yang melekat dalam sistem sosial dan ekonomi.

Keterbatasan dalam distribusi manfaat pendidikan dan pengeluaran publik tidak dapat dipisahkan dari bagaimana struktur sosial membentuk akses terhadap sumber daya. Pengeluaran pemerintah yang tidak merata, misalnya, dapat memperbesar ketimpangan jika hanya diarahkan ke wilayah atau sektor tertentu. Demikian pula, pendidikan yang tidak disertai dengan peluang kerja yang inklusif akan menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Dalam situasi ini, ketimpangan tidak hanya bersumber dari kurangnya intervensi, tetapi juga dari arah dan cara kebijakan dijalankan. Maka dari itu, keterkaitan antara pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan sangat erat dengan bagaimana struktur sosial mengatur siapa yang menerima dan siapa yang tertinggal dalam pembangunan.

Teori ini tidak hanya menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan atau tingginya pengangguran, tetapi menyoroti bagaimana sistem yang tidak inklusif turut membatasi efektivitas

kebijakan pembangunan. Dalam konteks ini, intervensi yang bersifat teknis tidak cukup jika tidak disertai perubahan dalam cara akses dan kesempatan

2.1.2 Teori Keynes

Teori Keynesian merupakan salah satu pilar dalam pemikiran ekonomi makro modern yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936 melalui karyanya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Teori ini hadir sebagai kritik terhadap pandangan klasik yang menganggap pasar dapat mencapai keseimbangan dengan sendirinya. Keynes justru meyakini bahwa mekanisme pasar sering kali gagal mendorong pemulihan ekonomi secara otomatis, terutama dalam situasi krisis. Menurut pandangan Keynes, pertumbuhan ekonomi tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Diperlukan peran aktif pemerintah melalui peningkatan pengeluaran publik sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mendorong aktivitas ekonomi (Hakib, 2019).

Keynes menekankan bahwa permintaan agregat, yang merupakan gabungan dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto, menjadi penentu utama tingkat output dan lapangan kerja. Ketika salah satu komponennya melemah, seperti saat konsumsi atau investasi menurun, perekonomian berisiko mengalami stagnasi atau bahkan resesi. Dalam kondisi tersebut, Keynes menyarankan agar pemerintah meningkatkan belanja negara untuk mengisi kekosongan permintaan tersebut dan memulihkan aktivitas ekonomi. Ia menyampaikan bahwa, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan permintaan melalui investasi publik, kebijakan perpajakan, dan pengeluaran, terutama saat masa kontraksi ekonomi (Keynes, 1936).

Gagasan Keynes kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Richard A. Musgrave (1959) dalam karyanya *The Theory of Public Finance*. Musgrave menegaskan bahwa peran kebijakan fiskal tidak hanya sebatas menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga mencakup fungsi alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan. Melalui fungsi distribusi, pengeluaran publik dapat diarahkan untuk mempersempit kesenjangan sosial ekonomi, misalnya melalui program pendidikan, kesehatan, subsidi, dan perlindungan sosial yang menysasar kelompok berpendapatan rendah (Musgrave & Musgrave, 1989).

Furceri et al. (2018) dalam kajian IMF menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah di negara-negara berkembang mampu menurunkan ketimpangan pendapatan secara signifikan, sedangkan pengurangan belanja sosial justru meningkatkan ketidakmerataan. Kebijakan fiskal tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat stabilisasi makroekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendistribusikan pendapatan masyarakat. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, serta perlindungan sosial, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam percepatan pemulihan ekonomi, tetapi juga dalam peningkatan kesempatan kerja, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Dalam perspektif Keynesian, keberhasilan suatu kebijakan fiskal tidak ditentukan oleh besarnya jumlah anggaran semata, melainkan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu menggerakkan sektor produktif dan memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, penurunan tingkat pengangguran dipandang sebagai salah satu mekanisme utama yang dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Konsep ini sangat relevan dengan isu-isu pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika pengeluaran publik diarahkan pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur maka efeknya bukan hanya pada peningkatan pertumbuhan, tetapi juga terhadap penurunan pengangguran dan perbaikan distribusi pendapatan. Dengan demikian, teori Keynesian juga mendukung pemahaman bahwa kebijakan fiskal dapat memiliki dampak redistributif, tergantung pada sektor dan sasaran belanja yang dipilih.

Studi oleh Furceri et al. (2018) memperkuat pandangan ini. Dalam analisisnya terhadap negara-negara berkembang, ditemukan bahwa peningkatan mendadak dalam pengeluaran pemerintah secara signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan, sedangkan pemangkasan belanja sosial justru meningkatkan kesenjangan. Hal ini menggarisbawahi bahwa strategi alokasi anggaran jauh lebih penting dibandingkan sekadar besarnya pengeluaran dalam menciptakan pemerataan. Dalam penelitian ini, teori Keynesian menjadi kerangka konseptual yang tepat dalam menjelaskan hubungan antara belanja negara, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan.

2.1.3 Human Capital Theory

Teori *Human Capital* atau modal manusia merupakan salah satu teori fundamental dalam ekonomi pembangunan yang pertama kali diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz pada awal 1960-an. Schultz menyampaikan bahwa sumber daya manusia merupakan bentuk modal yang dapat ditingkatkan produktivitasnya melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Teori ini kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh Gary Becker dalam bukunya *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (1964), yang

menjelaskan bagaimana pendidikan dan pelatihan dapat dianggap sebagai bentuk investasi ekonomi, karena memberikan pengembalian berupa peningkatan pendapatan individu di masa depan.

Dalam perspektif teori ini, pendidikan bukan hanya alat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga merupakan mekanisme untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Becker (1993) menyebutkan bahwa individu yang memiliki modal manusia lebih tinggi diukur dari tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah lebih tinggi. Akumulasi modal manusia ini kemudian menjadi faktor kunci dalam menentukan kemampuan seseorang berpartisipasi secara optimal dalam perekonomian. Teori ini juga berasumsi bahwa ketimpangan pendapatan dapat terjadi karena adanya disparitas dalam akumulasi modal manusia antar individu maupun wilayah.

Berbagai studi empiris mendukung validitas teori ini dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan. Suhendra et al. (2020), dalam analisis panel data 34 provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah, sebagai indikator modal manusia, berpengaruh negatif terhadap indeks Gini. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata masyarakat suatu daerah, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatannya. Knight dan Sabot (1990) memberikan peringatan bahwa ketimpangan pendidikan yang tidak merata justru dapat memperbesar kesenjangan pendapatan jika hanya kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas.

Namun, tidak semua penelitian sepenuhnya sejalan dengan asumsi teori ini. Studi oleh Vo et al. (2024), menggunakan data ASEAN 7 dari tahun 1992

hingga 2018 menemukan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan modal manusia dapat mengurangi ketimpangan pendapatann, namun dalam jangka panjang, peningkatan human capital tanpa diiringi reformasi struktural pada pasar kerja justru dapat memperbesar ketimpangan. Hal ini terjadi karena lulusan pendidikan tinggi hanya diserap oleh sektor-sektor tertentu, sementara sebagian besar tenaga kerja lain tetap berada di sektor informal dengan pendapatan rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas human capital dalam menurunkan ketimpangan juga sangat tergantung pada kualitas sistem ekonomi dan keterbukaan akses terhadap pasar kerja formal.

Dalam penelitian ini, teori human capital digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan pendidikan akan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Ketika pengangguran menurun, maka distribusi pendapatan menjadi lebih merata karena semakin banyak individu yang memiliki pendapatan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berdampak langsung terhadap ketimpangan, tetapi juga memiliki dampak tidak langsung melalui penurunan pengangguran.

Lebih jauh, pendidikan yang berkualitas akan mendorong transformasi struktural dalam ekonomi, dari dominasi sektor informal ke sektor formal yang lebih produktif. Dalam konteks ini, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori Keynesian yang juga digunakan dalam penelitian ini, bahwa belanja negara yang dialokasikan pada sektor strategis seperti pendidikan dapat menstimulasi permintaan dan menciptakan lapangan kerja. Teori human capital menjadi sangat

relevan dan krusial karena tidak hanya menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang dikaji, tetapi juga memberikan dasar argumentasi yang kuat terhadap kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.1.4 Marginal Productivity Theory

Teori Produktivitas Marjinal merupakan salah satu teori klasik dalam ekonomi tenaga kerja yang diperkenalkan oleh John Bates Clark (1899) melalui karyanya *The Distribution of Wealth: A Theory of Wages, Interest, and Profits*. Clark menjelaskan bahwa setiap faktor produksi, termasuk tenaga kerja, memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusinya terhadap peningkatan output produksi. Dengan kata lain, pendapatan atau upah yang diterima seorang pekerja bergantung pada besarnya tambahan hasil (output marjinal) yang dihasilkan dari tenaga kerja tersebut.

Pandangan ini kemudian disempurnakan oleh Alfred Marshall (1920) dalam *Principles of Economics* dan Arthur Pigou (1932) dalam *The Economics of Welfare*. Keduanya menegaskan bahwa produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya kemampuan, keterampilan, dan tingkat pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai investasi yang mampu meningkatkan kapasitas individu dalam menciptakan output yang lebih besar, sehingga berimplikasi langsung terhadap peningkatan produktivitas marjinal.

Menurut Mankiw (2021), variasi pendapatan yang terjadi di pasar tenaga kerja mencerminkan perbedaan tingkat produktivitas antarindividu. Pekerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih besar, sehingga memperoleh kompensasi atau upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kurang terdidik. Dengan demikian, pendidikan

berperan sebagai faktor utama dalam pembentukan produktivitas individu dan menjadi dasar dalam penentuan pendapatan di pasar tenaga kerja.

Selanjutnya, Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa peningkatan pendidikan dalam suatu perekonomian akan mendorong kenaikan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila akses terhadap pendidikan yang berkualitas tidak merata di antara kelompok sosial atau wilayah, maka peningkatan produktivitas hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil populasi. Situasi ini dapat memperbesar kesenjangan pendapatan, karena individu dengan produktivitas tinggi akan menerima proporsi pendapatan yang lebih besar, sedangkan kelompok dengan akses pendidikan rendah tertinggal secara ekonomi.

Pandangan serupa disampaikan oleh Jhingan (2019) yang menyatakan bahwa ketidaksamaan dalam pendidikan dan keterampilan menyebabkan perbedaan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan ini akan terus berlanjut apabila pemerintah tidak mengupayakan kebijakan pemerataan pendidikan sebagai instrumen peningkatan produktivitas nasional.

Dalam konteks penelitian ini, teori Produktivitas Marjinal memberikan dasar konseptual bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya memengaruhi distribusi pendapatan. Individu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih besar sehingga memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Namun, jika kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas hanya tersedia bagi kelompok tertentu, maka produktivitas dan pendapatan akan

terdistribusi secara tidak merata. Dengan demikian, teori ini memperkuat argumen bahwa pemerataan akses pendidikan merupakan faktor kunci dalam menekan ketimpangan pendapatan baik antarindividu maupun antarwilayah.

2.1.5 Teori Kuznets

Hipotesis Kuznets merupakan salah satu teori klasik dalam kajian ekonomi pembangunan yang diperkenalkan oleh Simon Kuznets pada tahun 1955 melalui artikelnya yang berjudul "Economic Growth and Income Inequality", diterbitkan dalam *American Economic Review*. Dalam pandangannya, Kuznets menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dalam suatu negara akan mengalami peningkatan terlebih dahulu seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian menurun setelah melewati titik tertentu dalam proses pembangunan. Pola ini dikenal dengan istilah kurva-U terbalik menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, sektor industri tumbuh lebih cepat dari sektor pertanian, menciptakan kesenjangan. Namun, ketika pembangunan berlanjut dan akses terhadap pendidikan serta lapangan kerja membaik, ketimpangan akan berkurang. Meski demikian, penelitian kontemporer menemukan bahwa di banyak negara berkembang, ketimpangan justru terus meningkat sehingga validitas hipotesis ini masih diperdebatkan.

Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan pendapatan yang diterima oleh masyarakat, yang sekaligus mencerminkan perbedaan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan mencerminkan distribusi yang tidak merata dari pendapatan nasional dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Penjelasan teori ini didasarkan pada perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Pada tahap awal pembangunan, kelompok masyarakat yang beraktivitas di sektor modern terutama di wilayah perkotaan lebih dahulu memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sementara kelompok lain yang masih berada dalam sektor tradisional tertinggal. Hal ini menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat. Namun, seiring waktu, akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan formal, dan pelayanan publik meningkat, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang bersifat redistributif, maka ketimpangan secara bertahap akan menurun. Teori ini menekankan pentingnya transformasi struktural dan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata.

Studi oleh Hermawan (2025) mengungkapkan bahwa hipotesis Kuznets yang menggambarkan pola kurva-U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terbukti relevan di Indonesia selama periode 2004 hingga 2023. Pada masa awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat, namun kesenjangan mulai menurun setelah pendapatan per kapita melewati ambang tertentu. Temuan ini menegaskan adanya hubungan nonlinier khas dalam teori Kuznets.

Selain itu, Farhan dan Sugianto (2024) juga menemukan hasil yang sejalan di tingkat kabupaten, yaitu peningkatan ketimpangan pada tahap awal pembangunan yang kemudian berbalik menurun sejalan dengan pemerataan akses pendidikan serta kesempatan kerja. Hasil tersebut memperkuat validitas teori Kuznets dalam menjelaskan perubahan ketimpangan pendapatan dengan mempertimbangkan berbagai faktor pembangunan yang inklusif.

Secara keseluruhan, hipotesis Kuznets memberikan sudut pandang penting dalam menganalisis dinamika ketimpangan pendapatan selama proses pembangunan. Teori ini menegaskan bahwa kesenjangan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh tingkat pertumbuhan semata, tetapi juga oleh sejauh mana hasil pembangunan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar teoretis bagi analisis kebijakan yang berfokus pada inklusi sosial, pemerataan kesempatan, serta efektivitas alokasi sumber daya publik dalam mengatasi ketimpangan secara berkelanjutan.

2.2 Hubungan Variabel

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan fiskal yang dirancang untuk mendorong pembangunan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan. Ketika anggaran dialokasikan secara menyeluruh pada sektor-sektor produktif dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, maka potensi penciptaan lapangan kerja meningkat. Kegiatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga secara langsung berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran. Dengan menurunnya angka pengangguran, makin banyak penduduk yang memperoleh pendapatan tetap, yang pada akhirnya memperkecil kesenjangan ekonomi.

Selain menurunkan pengangguran, belanja pemerintah juga berperan dalam mengurangi ketimpangan secara langsung, terutama bila diarahkan pada kelompok berpenghasilan rendah. Belanja sosial, subsidi pendidikan, atau pengembangan infrastruktur dasar merupakan bentuk intervensi yang membuka akses masyarakat terhadap fasilitas dan peluang ekonomi yang selama ini tidak

merata. Akses yang lebih luas terhadap pelayanan publik berdampak pada peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok marjinal, sehingga Gini Rasio sebagai indikator ketimpangan pendapatan dapat ditekan.

Dalam memaksimalkan dampak positifnya, pemerintah perlu mengarahkan belanja publik pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Upaya seperti memperluas proyek infrastruktur berbasis tenaga kerja lokal, mengembangkan pelatihan vokasional, serta memperkuat program pemberdayaan masyarakat menjadi langkah strategis agar efek pengeluaran pemerintah dan penurunan pengangguran berjalan secara simultan dalam menekan ketimpangan pendapatan.

Kusumaningtyas et al. (2023), Hasil penelitian dari analisis regresi panel mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah berperan signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja, sehingga berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran. Temuan ini mendukung pemikiran bahwa kebijakan fiskal yang aktif dalam meningkatkan belanja publik efektif sebagai alat untuk mengurangi pengangguran melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Penelitian lain oleh Rozaki dan Afiatno (2024), belanja pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Penurunan tingkat pengangguran turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan,

yang memperkuat hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pengurangan kesenjangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja pemerintah yang fokus pada sektor kesehatan dapat menjadi alat efektif dalam mengatasi ketimpangan pendapatan melalui mekanisme penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, Nasution et al. (2023). mendukung temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat membantu pemerataan pendapatan jika dialokasikan secara tepat dan mampu menurunkan pengangguran. Dengan kata lain, belanja pemerintah yang efektif, terutama di sektor padat karya atau sosial, tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga menurunkan ketimpangan pendapatan secara tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja.

2.2.2 Hubungan Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan

Pendidikan merupakan indikator penting yang mencerminkan akses dan kualitas pendidikan formal dalam suatu wilayah. Ketika pendidikan meningkat, maka secara umum masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik untuk memasuki pasar kerja. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan keunggulan kompetitif dalam mendapatkan pekerjaan formal dengan penghasilan yang stabil. Karena itu, peningkatan pendidikan diyakini akan menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, peningkatan angka pendidikan tidak serta-merta menurunkan ketimpangan pendapatan apabila tidak disertai dengan pemerataan kualitas pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja yang relevan. Ketimpangan pendidikan juga berperan negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang

pada akhirnya berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan (D Ghuzini, 2021). Jika lulusan pendidikan tidak terserap secara maksimal karena terbatasnya kesempatan kerja atau mismatch keterampilan, maka kelompok yang tidak bekerja atau hanya terserap di sektor informal tetap tertinggal secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran menjadi jalur penting yang menjembatani pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan.

Pendidikan yang tidak inklusif justru dapat memperbesar kesenjangan, sementara pendidikan yang merata dan berkualitas mampu menekan pengangguran dan mengurangi ketimpangan secara efektif. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak tenaga kerja yang kehilangan sumber pendapatan. Kondisi pengangguran yang berlebihan berpotensi menekan upah pekerja berpenghasilan rendah, sehingga memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan (Sukirno, 2011).

Penurunan angka pengangguran akan berdampak positif terhadap pemerataan pendapatan. Ketika masyarakat luas mendapatkan kesempatan kerja yang layak, distribusi pendapatan akan menjadi lebih seimbang karena semakin banyak individu yang memiliki penghasilan tetap. Sebaliknya, tingginya pengangguran berkontribusi pada semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat.

Menurut Suryadinata et al. (2023), Penelitian ini mengkaji dampak pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Jawa Timur menggunakan data time series tahunan dari indeks pendidikan dan rasio Gini kabupaten/kota. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan memiliki korelasi signifikan dengan pendapatan, dimana individu dengan pendidikan tinggi

cenderung memperoleh pendapatan lebih besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan produktivitas, akses kerja yang lebih baik, serta mobilitas sosial yang memungkinkan peningkatan status sosial melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan menjadi kunci penting dalam menjembatani kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Fazila Sidik dan Hendra Riofita (2025) meneliti hubungan antara pendidikan dan pengangguran, menemukan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keterhubungan antara pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan yang berkualitas membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih siap dan kompeten, sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya relevansi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri untuk memaksimalkan dampak positif pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian Firdauzi dan Dewi (2022) menemukan hubungan dua arah antara pendidikan dan pengangguran, serta pengaruh langsung dari pendidikan terhadap ketimpangan, dalam jangka panjang pendidikan terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pendidikan hanya efektif dalam menurunkan ketimpangan jika didukung oleh kemampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja secara inklusif. Maka untuk menekan ketimpangan secara menyeluruh, pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah tertinggal dan kelompok miskin. Upaya seperti pelatihan vokasional, penguatan pendidikan kejuruan, dan peningkatan relevansi kurikulum dengan

dunia kerja diperlukan agar lulusan pendidikan benar-benar siap bersaing di pasar kerja. Dengan strategi yang tepat, pendidikan tidak hanya menurunkan pengangguran, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan.

2.3 Studi Empiris

Rindiani et al. (2025), menggunakan data panel provinsi Indonesia periode 2013-2022 dengan metode Panel VECM dan menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak dari belanja di sektor ini bekerja melalui peningkatan kualitas layanan dasar serta memperluas akses kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Meskipun hasil jangka pendek tidak selalu langsung terlihat, dalam jangka panjang kebijakan fiskal ini mampu memperbaiki distribusi pendapatan secara lebih merata. Temuan tersebut menegaskan bahwa intervensi belanja publik, khususnya pada pendidikan dan sosial, memiliki peranan penting dalam proses redistribusi pendapatan di Indonesia.

Ashari et al. (2024), Penelitian ini mengkaji dampak dari pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan menggunakan data panel dari 34 provinsi Indonesia periode 2019-2023 dengan model Random Effect. Hasil analisis memperlihatkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan, artinya kualitas dan akses pendidikan yang lebih baik dapat mengurangi kesenjangan pendapatan. Sebaliknya, kemiskinan memiliki pengaruh positif signifikan yang menunjukkan peningkatan kemiskinan memperbesar ketimpangan. Pengangguran tidak berpengaruh signifikan secara

parsial, namun ketiga variabel secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan dengan signifikansi yang relevan. Penelitian merekomendasikan pengembangan variabel dan metode untuk analisis yang lebih mendalam ke depan. Kesimpulannya, peningkatan pendidikan dan pengentasan kemiskinan menjadi strategi utama mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Haryono et al. (2025), mengkaji pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan data panel dari 34 provinsi sepanjang periode 2015–2023. Variabel yang dianalisis meliputi rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, belanja pemerintah di sektor pendidikan, serta PDRB per kapita. Metode yang digunakan adalah Model Efek Tetap (Fixed Effects Model) dengan pendekatan Least Square Dummy Variable (LSDV). Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah berkontribusi signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Demikian pula, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terbukti berperan dalam mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan, menegaskan pentingnya investasi publik di bidang ini. Sebaliknya, peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi tidak berdampak signifikan terhadap penurunan ketimpangan, kecuali jika diiringi dengan peningkatan kualitas serta pemerataan akses pendidikan.

Alamanda (2020), meneliti terkait dampak pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data panel dari 33 provinsi pada periode 2005. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk bantuan sosial, subsidi, maupun hibah tidak berpengaruh signifikan dalam menekan ketimpangan pendapatan maupun tingkat kemiskinan. Sebaliknya, alokasi anggaran infrastruktur terbukti

berkorelasi negatif dengan ketimpangan, baik di kawasan perkotaan (berdasarkan model efek acak) maupun pedesaan (berdasarkan model efek tetap). Selain itu, belanja infrastruktur juga memberikan dampak negatif signifikan terhadap kemiskinan, bahkan lebih kuat di wilayah pedesaan dibandingkan di perkotaan. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan sangat bergantung pada jenis belanja yang dilakukan.

Isnaini et al. (2023), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, artinya belanja publik yang dilakukan justru cenderung memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran yang belum merata dan kurang efektif menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, struktur tenaga kerja yang masih didominasi oleh sektor pertanian, yang memiliki produktivitas rendah, turut memperburuk ketimpangan antarwilayah. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan belanja yang lebih inklusif dan redistributif agar dapat menekan ketimpangan secara nyata.

Wahyudi (2023), dalam penelitiannya yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) yang mencakup 34 provinsi selama periode 2015 hingga 2019. Analisis dilakukan menggunakan model data panel, dengan Model Fixed Effect terpilih sebagai metode paling tepat untuk mengestimasi hubungan antar variabel dalam persamaan pertumbuhan ekonomi

dan ketimpangan pendapatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, pengeluaran di sektor-sektor tersebut berkontribusi secara negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, yang menandakan peran belanja publik dalam mengurangi kesenjangan. Namun, pertumbuhan ekonomi sendiri tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.

Isikian et al. (2025) meneliti terkait dampak alokasi ulang belanja publik terhadap ketimpangan dengan menggunakan data panel dari 51 negara berpendapatan menengah selama periode 2005–2015. Studi ini menggunakan skenario fiskal netral, dengan pertimbangan bahwa banyak negara berkembang tidak dapat dengan mudah mengandalkan defisit, utang, ataupun peningkatan penerimaan negara untuk membiayai sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Analisis juga memasukkan dinamika krisis keuangan global 2007–2009 dan menilai dampaknya pada berbagai kelompok distribusi pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan anggaran ke sektor pendidikan berkontribusi signifikan dalam menurunkan ketimpangan, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik kelompok miskin maupun relatif kaya. Sebaliknya, alokasi ulang ke sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pertanian memberikan hasil yang lebih beragam serta tidak konsisten antarnegara. Temuan ini menegaskan pentingnya memperhatikan aspek redistributif dalam kebijakan fiskal, khususnya melalui belanja pendidikan, sebagai salah satu instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Ersad et al. (2022), meneliti di wilayah Sumatera bagian Selatan periode 2010-2019 dilakukan untuk menelaah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan serta hubungannya dengan ketimpangan pendapatan antarprovinsi. Dengan menggunakan data panel lima provinsi dan metode regresi *Fixed Effect Model*, hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun secara parsial, IPM dan tingkat kemiskinan tidak memberikan pengaruh yang berarti, sedangkan tingkat pengangguran justru berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, yang menandakan bahwa peningkatan kesempatan kerja dapat membantu menekan ketidakmerataan pendapatan di kawasan tersebut.

Aryanti et al. (2024), mengkaji pengaruh variabel pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2013 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengangguran dan pendidikan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, variabel kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya peningkatan kesehatan masyarakat cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan ketimpangan pendapatan, baik antarwilayah maupun antarindividu, memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, yang menandakan bahwa semakin besar ketimpangan, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Kesimpulannya, perubahan pada variabel pengangguran dan pendidikan tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan perubahan pada variabel kesehatan dan ketimpangan pendapatan secara signifikan mempengaruhi naik turunnya kemiskinan di Indonesia.

Aswar (2018), meneliti ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2002–2016. Penelitian tersebut menganalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung dari rasio belanja daerah terhadap total belanja, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, serta rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan wilayah. Dengan menggunakan Indeks Williamson dan metode *Structural Equation Modeling (SEM)*, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan.

Istikharoh et al. (2018) mengkaji ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2008–2018, yang menempati posisi tertinggi di Pulau Jawa akibat ketidakmerataan pola pengeluaran yang berbeda-beda antarpenduduk. Penelitian menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja dengan analisis regresi data panel melalui *common effect model* untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan dari tingkat pendidikan, upah minimum, dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dimana lulusan SMA dan perguruan tinggi yang menganggur menambah ketimpangan, serta perbedaan pendapatan antarwilayah memperbesar ketimpangan. Di sisi lain, tingkat pengangguran tidak memberikan pengaruh signifikan, karena penurunan tenaga kerja pengangguran disebabkan sektor informal yang menyerap tenaga kerja. Secara simultan, ketiga variabel ini berikutnya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut selama periode tersebut.

Danawati et al. (2016), Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berperan penting dalam meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Namun, meskipun investasi dan pengeluaran pemerintah meningkatkan ketimpangan pendapatan, peran kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi sebagai mediator pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan justru dapat membantu meratakan pendapatan. Sebaliknya, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi belum efektif memediasi pengaruh investasi terhadap ketimpangan yang cenderung meningkat. Secara keseluruhan, pengelolaan pengeluaran dan investasi perlu diarahkan agar pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja tidak hanya meningkat, tetapi juga mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Bali.

Weya (2022), Penelitian ini membahas pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data panel menggunakan model efek acak. Data yang dipakai adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara selama periode 2017-2021. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di 33 kabupaten/kota di wilayah tersebut. Sementara itu, kemiskinan menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara keseluruhan, baik pengangguran maupun kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.

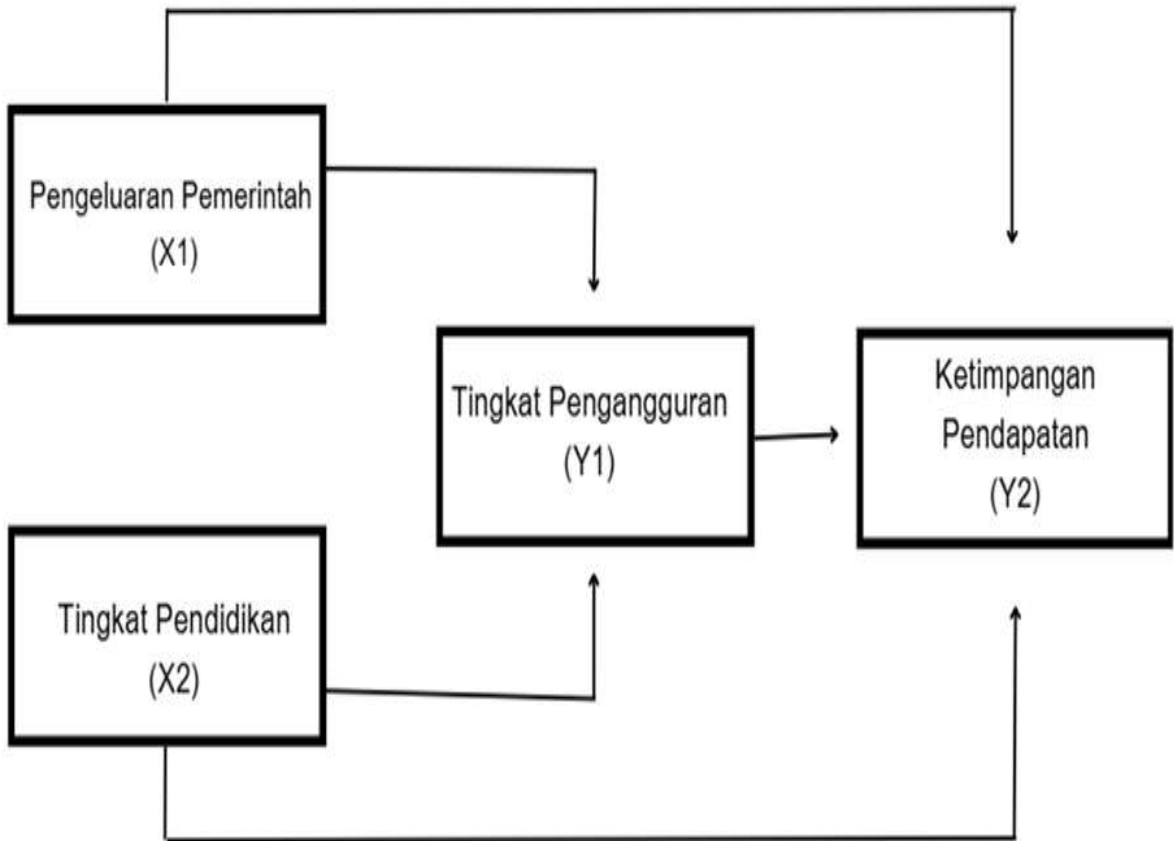
Gurusinga et al. (2022), Pemerataan pendapatan merupakan aspek utama yang perlu diperhatikan karena menjadi salah satu strategi dan tujuan dalam

pembangunan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten serta mengetahui pengaruh investasi dan penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder berbentuk time series diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan National Single Window for Investment (NSWI). Analisis menggunakan Indeks Williamson dan regresi data panel, menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten di Sumatera Utara pada 2016-2020 berada pada kategori rendah dengan nilai indeks Williamson sebesar 0,1329. Tingkat investasi memberikan pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif signifikan. Secara simultan, investasi dan penyerapan tenaga kerja berdampak signifikan pada ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengkaji hubungan antara pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia, dengan tingkat pengangguran berperan sebagai variabel mediasi. Ketimpangan pendapatan (Y2) berfungsi sebagai variabel dependen utama dalam studi ini. Sementara itu, pengeluaran pemerintah (X1) dan tingkat pendidikan (X2) merupakan variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui tingkat pengangguran (Y1) sebagai variabel perantara.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran, yang kemudian berdampak pada ketimpangan pendapatan. variabel pengangguran berperan sebagai perantara dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.5 Hipotesis

1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pengangguran.
2. Diduga tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pengangguran.